

DIFABEL NEWS

BERGERAK MAJU BERSAMA MENUJU PERUBAHAN

Internasional Difabel Day, Bagaimana di Indonesia?



DIFABEL NEW'S

Diterbitkan oleh SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak)

Pimpinan Umum. Nurul Saadah Andiani, SH. **Pimpinan Redaksi** Totok Rawi Djati. **Dewan Redaksi.** Tari, Miko, Yuni, Purwanti, Edy Supriyanto, Widi Haryanti. **Sekretaris Redaksi.** Juju Juliati. **Redaktur Pelaksana.** Totok Rawi Djati, Edy Subagiyo, Made, Edy Supriyanto. **Litbang** Made **Layout** Totok . **Produksi/Sirkulasi.** Yuni, Alvy, Purwanti. **Alamat Redaksi** Komplek BNI No. 25 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta Telp 0274 384066

Web : www.sapdajogja.org

Pemkot Medan Peringati Difabel Day

Pemko Medan Hari Internasional Penyandang Cacat, Rabu (7/12). Peringatan ini mengalami keterlambatan dari tanggal seharusnya 3 Desember 2011.

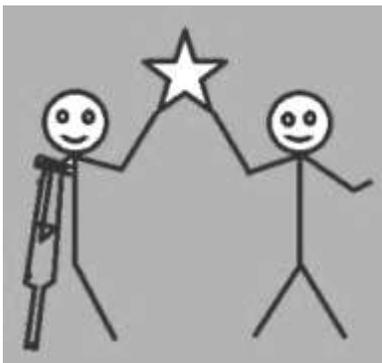
"Keterlambatan penyelenggaraan peringatan ini tidaklah mengurangi arti penting dari acara ini," kata Walikota diwakili Staf Ahli Rasyid,SH didampingi Kabag Kesra Drs Ahmad Raja Nasution,MSi saat memperingati Hari Internasional Penyandang cacat, di Pondok Selesehan Sari Raos Jalan Dr Mansyur.

Menurutnya sebagai negara anggota PBB yang ikut menandatangani Konvensi PBB mengenai penyandang cacat, setiap tahunnya secara rutin kita memperingati Hari Internasional Penyandang cacat. Pemerintah telah mengatur tentang penyandang cacat dalam Undang-undang nomor 4 tahun 1997, dan Peraturan Pemerintah nomor 43 tentang upaya peningkatan kesejahteraan social penyandang cacat.

Pada kesempatan itu Walikota yang diwakili Rasyid memberikan 17 buah mesin jahit kepada penyandang cacat pisik dan 25 set bantal dan tilam kepada penyandang cacat tunanetra.

Sebelumnya Kabag kesra Drs Ahmad Raja Nasution melaporkan, kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk membangun kepedulian dan peran aktif kelompok-kelompok masyarakat, Lembaga pendidikan SDLB/SLB, yayasan social, pelaku dunia usaha dan pemerintah sebagai fasilitator. Selain untuk memotivasi para penyandang cacat agar tidak berkecil hati dan terus berkarya, karena cacat bukan halangan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

(Redaksi & berbagai Sumber)



Bursa Kerja Penyandang Disabilitas

Menyambut Hari Internasional Penyandang Cacat yang jatuh setiap tanggal 3 Desember, Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta, untuk kedua kalinya menyelenggarakan kegiatan Bursa Kerja Bagi Penyandang Disabilitas (22/11/2011), diikuti sekitar 20 pengusaha/home industry dari wilayah Surakarta, Jateng, Jatim dan Yogyakarta, menurut Kepala Bidang Penyaluran dan Binjut BBRSD Prof. Dr. Soeharso, Yulaekah, "adanya kegiatan ini tentu akan membantu akses bagi penyandang cacat dalam mencari kerja, penyandang cacat bisa langsung mendaftar dan interview langsung sesuai kemampuan yang mereka miliki, sehingga mereka mampu mendapatkan peluang kerja diperusahaan tersebut".

"Kami sangat mengharapkan dari kegiatan tersebut dapat menyerap tenaga kerja penyandang disabilitas, minimal terserap 20 – 30 % diperusahaan/home industry, job fair disabilitas merupakan bursa kerja khusus, karena tenaga kerja penyandang disabilitas yang mengikuti dan melamar kerja mempunyai cirri khas mereka tidak perlu berdesak – desakan dan bersaing dengan ribuan pelamar kerja, karena yang diprioritaskan disini adalah yang mengalami kecacatan, namun harus memiliki kemampuan sesuai bidang dan kebutuhan perusahaan yang membutuhkan", lanjutnya. Sementara itu aktivis, dosen dan Pemerhati Masalah Kesejahteraan Sosial, Baby Jim Aditya sangat menyambut positif kegiatan tersebut, setidaknya ini memberikan kesempatan dan kesetaraan yang sama kepada penyandang disabilitas untuk terlibat dalam pembangunan industry dan menunjang kebutuhan perusahaan dalam pengadaan sumber daya manusia, walaupun mereka punya keterbatasan fisik namun secara kinerja mereka bisa seperti yang normal lainnya. "Perlu disosialisasikan bagaimana penyandang disabilitas bisa terserap dalam dunia kerja, kedepannya mungkin setiap daerah perlu mengadakan event seperti ini, sehingga skill penyandang disabilitas tidak merasa terabaikan tetapi bermanfaat dalam menujung kualitas pekerjaan, mungkin juga harus ada kerjasama antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Tenaga Kerja", ujarnya. Peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat (HIPENCA) ini bertujuan untuk mengembangkan wawasan masyarakat akan persoalan-persoalan yang terjadi berkaitan dengan kehidupan para penyandang cacat dan memberikan dukungan untuk meningkatkan martabat, hak, dan kesejahteraan para penyandang cacat termasuk dalam hal mendapatkan pekerjaan.

(Redaksi & Berbagai Sumber)

Hari Penyandang Cacat Internasional, Bagaimana di Indonesia?



Jakarta - 19 Tahun lalu, PBB menetapkan hari ini sebagai Hari Penyandang Cacat Internasional. Kurun waktu tersebut Indonesia telah mengesahkan konvensi internasional menjadi UU tentang Hak Penyandang Disabilitas (cacat) pada Oktober lalu.

"Perlakuan terhadap disabilitas jangan dimaksudkan sebagai charity/ belas kasihan. Tetapi masyarakat harus melandaskan kepada penghormatan hak asasi manusia," kata komisioner Komnas HAM, Saharudin Daming kepada wartawan, Sabtu (3/12/2011).

Sayangnya, masyarakat, pelaku usaha atau pemerintah masih memandang sebelah mata para disabilitas. Berikut beberapa perlakuan diskriminatif yang terekam media:

Layanan Pesawat Terbang

Ridwan Sumantri, seorang penyandang disabilitas menggugat ke pengadilan sebuah perusahaan maskapai penerbangan nasional. Gugatan ini bermula ketika Ridwan, hendak terbang menuju Denpasar pada Senin 11 April 2011 dari Bandara Soekarno-Hatta. Ridwan merasakan perlakuan diskriminatif usai melakukan check in.

Awalnya dia meminta tempat duduk bagian depan supaya tidak terlalu jauh digendong. Nyatanya, dia mendapat seat 23 A atau bagian tengah. Diskriminasi lainnya yaitu dia dipaksa menandatangani surat sakit. Tercantum pula jika sakitnya menyebabkan penumpang lain sakit, maka dia yang harus menanggung. Dirinya sempat protes hingga penerbangan molor selama 40 menit. Kru pesawat juga mengancam apabila tidak mau menandatangani surat sakit, maka Ridwan harus turun. Kasus ini masih bergulir di PN Jakpus.

Layanan Perbankan

Penyandang tuna netra di Medan, Sumatera Utara pada pertengahan 2011 ditolak untuk menjadi salah satu nasabah di bank swasta. Penyandang tunanetra ditolak pihak bank karena dianggap tidak mampu melakukan kewajibannya sebagai nasabah.

Hak Mendapatkan Pekerjaan

Puluhan pekerja yang tuna rungu/tuna wicara di sebuah restoran waralaba terkenal di Jakarta di-PHK tanpa pesangon pada Mei 2011. Padahal, mereka telah mengabdikan di resto cepat saji yang ada di Gedung Sarinah itu selama 15 tahun. Mereka di PHK dengan alasan pemilik lahan tidak berhasil mereguk untung dari bisnis jualan ayam goreng dan hamburger. Akhirnya waralaba itu gulung tikar per Mei 2010.

Layanan Fasilitas Publik

Nenek Sukartinah (69), mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sambil menggunakan kursi roda, Sukartinah susah payah memasuki gedung PN yang berundak. Pihak PN Jakpus beralasan belum bisa membuat lift karena listrik tidak kuat.

Akses transportasi di Jakarta belum ramah terhadap penyandang cacat. Seperti halte bus, terminal bus, stasiun. Beberapa gedung pemerintahan juga belum semuanya memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas. (Redaksi)



Semarak Hari Internasional Penyandang Cacat 2011

“Saya sama Seperti Anda, Namun Anda Berbeda Seperti Saya, Hilangkan Diskriminasi Terhadap Penyandang Cacat”

Sebanyak 700 undangan termasuk penyandang disabilitas memenuhi ruang gedung serba guna Balai Samudera Kelapa Gading, untuk berkumpul memeriahkan Hari Internasional Penyandang Disabilitas, “peringatan ini ditujukan untuk membangkitkan dan menggugah kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan penyandang disabilitas di Indonesia, demikian diungkapkan Menteri Sosial, Salim Segaf Al Jufri pada puncak peringatan Hipenca, Sabtu, 3/12/2011. Peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat (HIPENCA) ini bertujuan untuk mengembangkan wawasan masyarakat akan persoalan-persoalan yang terjadi berkaitan dengan kehidupan para penyandang cacat dan memberikan dukungan untuk meningkatkan martabat, hak, dan kesejahteraan para penyandang cacat termasuk dalam hal mendapatkan pekerjaan, lanjutnya.

Mensos menambahkan, tidak boleh ada diskriminasi terhadap penyandang cacat. Dengan adanya ratifikasi, para penyandang cacat bukan lagi sekedar objek, penyandang disabilitas mempunyai kewajiban yang sama untuk pembangunan nasional dalam berbagai bentuk yang ditujukan untuk penguatan kapasitas. “Saya melihat komitmen dari dunia usaha cukup bagus. Ada beberapa perusahaan bahkan sepertiga dari karyawannya penyandang disabilitas. Itu memberikan kesadaran kepada seluruh komponen bangsa bahwa mereka juga bagian penting dalam pembangunan,” lanjutnya.

Sejumlah perusahaan kini telah menunjukkan ketertarikan mereka untuk mempekerjakan penyandang disabilitas, yang terpenting adalah bagaimana membekali mereka dengan skill yang dibutuhkan perusahaan sehingga tercipta kemandirian dalam bekerja dan membuka usaha sesuai bidang dan penerapan yang mereka dapatkan selama mendapatkan pelatihan dan bimbingan sesuai bidangnya, ungkapny.

Penyandang disabilitas tentunya akan begitu mudah dalam bekerja ketika mereka memiliki skill, perusahaan bisa lebih meningkatkan kepeduliannya dalam memperhatikan penyandang cacat. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam UU No 4/1997 tentang mempekerjakan satu persen penyandang cacat di perusahaan, lanjut Salim.

Sementara itu menurut Ketua Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI) Gufroni Sakril, mengatakan bahwa istilah penyandang “cacat” harus diubah, karena istilah tersebut mengandung nilai yang cenderung bermakna negatif”.

“Penyandang cacat dianggap sebagai sekumpulan orang yang tidak berdaya, tidak mampu dan menyandang masalah karena tercela atau cacat,” tutur mantan klien BBRVBD Cibinong UPT milik Kementerian Sosial ini.

“Setidaknya ini memberikan kesempatan dan kesetaraan yang sama kepada penyandang disabilitas untuk terlibat dalam pembangunan dan menunjang kebutuhan dalam pengadaan sumber daya manusia, walaupun mereka punya keterbatasan fisik namun secara kinerja mereka bisa seperti yang normal lainnya”, lanjut Gufron.

Kesempatan yang sama Menkokesra, Agung Laksono didampingi Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, Meneg PP Linda Agum Gumelar, dan Dirjen Rehsos Makmur Sunusi menyerahkan alat bantu secara simbolis kepada 4 penyandang disabilitas berupa kursi roda, selain itu juga memberikan penghargaan kepada 10 perusahaan yang telah mempekerjakan penyandang disabilitas serta penghargaan kepada Pemerintah Australia atas kontribusinya dalam edukasi dan promosi untuk meningkatkan kualitas sumber daya penyandang disabilitas.***(Tira/C-9, Dok)

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial



DIFABEL NEWS Menerima Tulisan Atau Artikel Dari Kawan-kawan, Tulisan Bisa Dikirim Melalui Email: totokrawidjati@gmail.com Atau Bisa Langsung Di Alamatkan Ke Redaksi DIFABEL NEWS . Komplek BNI No.25 Jl Madubronto Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta,Telp 0274 384066. Kritik dan Saran Sangat Berarti Bagi Perkembangan Dan Perubahan Kita Bersama

Ratusan Anak Peringati Hari Penyandang Cacat

TRIBUNJOGJA.COM, SOLO - Ratusan anak penyandang cacat atau biasa disebut kaum difabel memperingati Hari Penyandang Cacat Dunia. Aksi diisi dengan berbagai lomba dan pentas musik. Para anak-anak tersebut juga menyuarakan aspirasi mereka lewat berbagai poster.

Peringatan Hari Penyandang Cacat Dunia itu dipusatkan di Plasa Sriwedari, depan Taman Sriwedari. Mengenakan seragam Pramuka, para siswa itu berbaris rapi di city walk. Ada yang duduk di kursi roda, ada pula yang duduk lesehan beralaskan tikar.

Para anak-anak difabel tersebut berasal siswa SLB Yayasan Penyandang Anak Cacat (YPAC) Solo. "Kami ingin mengajak anak-anak bahwa cacat bukan menjadi halangan. Mereka juga bisa berprestasi," kata Sugiyanto, pengajar di SLB YPAC, Sabtu (3/12/2012). Lomba-lomba yang digelar antara lain, makan kerupuk, balap kelereng, dan tarik tambang.

Anak-anak yang datang terlihat bahagia mengikuti berbagai lomba tersebut. Mereka tertawa lepas diatas kursi roda sambil bertepuk tangan menyemangati rekan-rekan yang sedang berlomba. Terlebih, setiap selesai lomba, baik yang kalah atau menang tetap dapat hadiah.

Sugiyanto melanjutkan, momen Hari Penyandang Cacat Internasional tersebut juga harus menjadi titik awal masyarakat tak menyandang sebelah mata kaum difabel. Sebab, selama ini kaum difabel masih sering mengalami diskriminasi. "Jangan berikan kami ikan, tapi berikan kami kail. Hal itu akan membuat kami mandiri," kata Sugiyanto yang mengalami lumpuh kaki ini.

Dalam aksi itu, para anak difabel yang berprestasi juga turut serta. Ada yang juara olimpiade fisika hingga menjadi atlet Asean Paragames 2011. "Mereka kami jadikan motivator untuk mengajak teman-teman sesama difabel untuk lebih bersemangat. Jika anak-anak difabel ini berusaha keras, juga bisa berprestasi," kata Mayor Haristanto panitia kegiatan.

3 Desember 2011

Jangan Sisihkan, Beri Kesempatan Kerja

Bahagia sekaligus prihatin, demikian perasaan yang dirasakan Walikota Semarang saat bersama jajaran SKPD Kota Semarang mengikuti kegiatan *Special Day, Special Children* di Central City Mall, Senin (5/12). Kegiatan ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Penyandang Cacat Sedunia yang diperingati setiap tanggal 3 Desember. Kegiatan *Special Day, Special Children* ini diikuti kurang lebih 1.200 anak berkebutuhan khusus dari berbagai yayasan, sekolah, panti asuhan maupun pribadi yang ada di Kota Semarang. Kegiatan yang diselenggarakan yayasan *Precious One* bekerjasama dengan pengelola mesin hiburan Mr. Games ini bermaksud membantu anak berkebutuhan khusus untuk merasakan bahagia, berharga dan menikmati masa kecil mereka. Dalam kegiatan *Special Day, Special Children* ini anak-anak dapat menikmati berbagai macam permainan yang disediakan dan menukarkan kupon hasil bermain dengan hadiah-hadiah yang disediakan. "Di satu sisi bahagia melihat raut wajah anak-anak berkebutuhan khusus yang menikmati kegiatan bermain-main ini, namun disisi lain juga terselip rasa prihatin melihat mereka," ungkap Walikota. Keprihatinan tersebut, lanjut Walikota, perlu dibarengi dengan langkah dan upaya-upaya untuk meringankan beban anak-anak berkebutuhan khusus.

Walikota dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan ajakan untuk bersama-sama memberikan perhatian, kasih sayang serta melakukan langkah nyata menolong para anak berkebutuhan khusus, baik oleh pemerintah, masyarakat maupun bersama dengan lembaga-lembaga yang peduli dengan berkebutuhan khusus. Tiga hal yang harus terus dijamin dan diupayakan, lanjut Walikota adalah, kepastian bahwa para berkebutuhan khusus dapat bersekolah sesuai dengan umur dan tingkatan masing-masing. Kedua, adalah dengan menjamin agar berkebutuhan khusus tidak putus sekolah serta yang ketiga adalah mencarikan ataupun memfasilitasi lapangan pekerjaan bagi para anak berkebutuhan khusus. Bagi anak berkebutuhan khusus yang sudah dewasa jangan sampai disisihkan ataupun tidak diberi kesempatan untuk bekerja. "Beri kesempatan bagi mereka untuk berkarya baik secara mandiri dengan berwiraswasta ataupun menyalurkan kemampuan masing-masing pada lapangan pekerjaan yang sesuai" terang Walikota. Fasilitas, lanjutnya, dapat pula dilakukan dengan penyediaan peralatan, sarana prasarana hingga pemasaran produk, dll. Fasilitas dan bantuan pemerintah juga diwujudkan dalam bentuk dana bantuan khusus bagi anak berkebutuhan khusus. Walikota pun memastikan kecukupan dan alokasi dana pelayanan kesehatan bagi ibu hamil yang relatif tinggi sehingga diharapkan kelahiran bayi sehat dan normal lebih banyak. Selain itu, angka kematian ibu dan bayi di Kota Semarang pun mengalami penurunan dan berada pada angka yang relatif kecil. *kontributorHmsPemkot_asdani

Difabel Sukoharjo menuntut realisasi aksesibilitas

Sukoharjo (Solopos.com)--Kaum difabel atau penyandang cacat Sukoharjo menuntut realisasi Perda No 7 tahun 2009 tentang perlengkapan difabel.

Karena selama ini mereka merasa termarginalisasi **menyusul minimnya sarana yang bisa mereka manfaatkan.** "Di hari difabel internasional ini kami mendesak pemerintah merealisasikan Perda tersebut. Terutama kami menuntut soal aksesibilitas di beberapa tempat yang belum ada sarana bagi kami," terang Ketua Perkumpulan Difabel Sukoharjo, Sehati, Edy Supriyanto ketika ditemui di sela-sela penghijauan di Sukoharjo akhir pekan kemarin.

Edy menambahkan pihaknya juga berharap ada keadilan berupa kesetaraan hak kepada difabel Sukoharjo. Sebab pada implementasi Perda itu di lapangan dinilai masih sangat lemah. Hal ini antara lain ditandai minimnya akses bagi difabel baik dalam bentuk pekerjaan, sosial maupun layanan umum.

"Kabupaten Sukoharjo sebenarnya sudah punya Perda tentang pemberdayaan difabel, tapi pada praktek di lapangan masih lemah. Kami juga menuntut kepada pemerintah terkait penyetaraan hak semisal mendapat pekerjaan atau kemudahan lainnya," tegas dia.

Di sisi lain pada akhir pekan kemarin sekitar 50 anggota difabel Sukoharjo melakukan penghijauan dengan menanam sekitar 250 pohon di sepanjang Kali Joho, Sukoharjo Kota. Hal itu dilakukan guna memperingati hari difabel internasional.

"Selain penghijauan pada tanggal 10 Desember yang akan datang kami juga memunyai acara workshop konsep rehabilitasi bersumber daya masyarakat. Terus tanggal 18 Desember kami berencana menyelenggarakan penyadaran publik tentang isu-isu difabilitas dalam rangka sosialisasi UN convention right with disability UU No 19/2011 dan sebagainya," terang Edy.

Sementara Ketua Muresko Sukoharjo, A Bimo Kokor Wijnarko menambahkan pada peringatan hari difabel internasional tahun ini dilakukan dalam sebuah kegiatan sosial masyarakat. Kegiatan tersebut antara lain penanaman pohon, pemberian 10 kursi roda kepada difabel Sukoharjo, pemberian ranjang kepada penderita mikrosyphalus (pengecilan kepala) kepada Nova Rizky Sandana, 2, warga Dukuh Mojolaban dan sebagainya.

Difabel berhak atas layanan kesehatan

JOGJA—Setiap warga berhak atas layanan kesehatan (Yankes). Dengan demikian tidak ada alasan untuk membedakan pelayanan kesehatan terhadap penyandang cacat atau difabel. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan wakil gubernur DIY Sri Paduka Paku Alam IX, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan bahwa pada dasarnya semua orang termasuk difabel memiliki hak untuk menikmati yankes dengan mutu yang baik tanpa diskriminasi.

Paku Alam menyampaikan, salah satu strategi meminimalisir diskriminasi yakni dengan meningkatkan pelayanan kesehatan **merata, terjangkau, bermutu, dan berkeadilan.** "Disamping itu perlu mengutamakan upaya promotif dan preventif," tuturnya mewakili Sultan dalam peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat (Hipenca) di Bangsal Kepatihan, Sabtu (3/12).

Lebih lanjut disampaikan, Hipenca merupakan momentum difabel untuk mendapatkan hak atau diberi kesempatan menunaikan kewajiban dan berperan penuh dalam seluruh kegiatan bermasyarakat secara proporsional.

"Juga mendapatkan hak untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, dengan harapan memiliki ketrampilan yang dapat memenuhi pasar kerja," lanjut Paku Alam.

Terpisah, Ketua penyelenggara Hipenca pemerintah provinsi DIY, BRAY Prabukusumo menyampaikan, selain sebagai langkah untuk menyosialisasikan upaya pemberdayaan penyandang cacat disabilitas di segala bidang kehidupan, tujuan penyelenggaraan Hipenca yakni sebagai pemenuhan hak-hak dasar penyandang cacat.

"Juga untuk meningkatkan pemahaman, kepedulian dan keberpihakan negara dan masyarakat terhadap penyandang disabilitas," tutur BRAY Prabukusumo.

Sebelum kegiatan puncak Hipenca Provinsi DIY, telah diadakan Seminar, Tholk Show, lomba mewarnai gambar maupun lomba lainnya.

Pada puncak acara, Paku Alam dan BRAY Prabukusumo menyerahkan hadiah lomba sekaligus penyerahan bantuan satu kursi roda, 656 stel pakaian pramuka dan 843 pasang sepatu untuk 14 SLB di DIY. (*HARIAN JOGJA/Pamuji Tri Nastiti*)

Rusidah, Fotografer Tanpa Jari dari Purworejo



Memotret tanpa jari, tak terbayangkan sebelumnya. Tapi dengan perempuan bernama Rusidah, perempuan fotografer, memotret dengan keterbatasan diri sebagai tuna daksa. Kenyataan memiliki tangan hanya selengan, tanpa kehadiran jari dan telapak di kedua tangan, tak menghalangi Rusidah menjadi fotografer profesional.

Lahir tahun 1968, Rusidah sudah mulai memotret profesional sejak 1995. Berbekal kamera bantuan pemerintah Kabupaten Purworejo, waktu itu Rusidah memotret dengan kamera film. Jasa fotografi Rusidah terbagi menjadi 2 paket, per foto seharga Rp 5 ribu dan per paket 30 foto ukuran 4R seharga Rp 150 ribu termasuk album.

Hadir di jumpa pers berkaitan dengan Canon Photo Marathon 2011 di Jogja, Rusidah berbagi kisah sebagai perempuan fotografer yang mencari nafkah sepenuhnya dari memotret. Suaminya berprofesi sebagai penjual es putar.

Sekarang Rusidah sudah bekal kamera digital **Canon EOS 550D dan flash Canon Speedlite 430EX II.** "Saya mulai motret sejak pakai kamera film. Sudah beberapa merk kamera pernah saya pakai," papar Rusidah, sembari menunjukkan album-album hasil karyanya. Uang terbanyak diperolehnya dari jasa memotret pada saat karnaval tingkat kampung, selain dari jasa memotret resepsi pernikahan. "Saya ingin punya studio foto," ungkapny.

Gayung bersambut seiring bantuan PT Datascrip sebagai distributor kamera Canon di Indonesia. Rusidah memperoleh seperangkat fotografi studio sederhana dan cetak foto. "Bu Rusidah jadi motivasi kita. Semangat pantang menyerah," ungkap Merry Harun, Direktur Divisi Canon PT Datascrip. Seusai jumpa pers, staf Datascrip menyertai kepulangan Rusidah ke Purworejo untuk memberi pelatihan penggunaan peralatan studio foto dan cetak foto. Rusidah menjadi teladan, contoh nyata sosok manusia pantang menyerah. (redaksi)

Disabilitas bukan Hambatan untuk Mengembangkan Diri

SEORANG perempuan belia terlihat berjalan perlahan sambil meraba dinding. Meski tertatih, ia berhasil sampai ke ruang makan yang ia tuju. Murti, gadis berusia 18 tahun itu, ialah seorang tunanetra sejak lahir. Selain itu, ia mengalami disabilitas mental sehingga disebut penyandang disabilitas ganda. Namun, siapa sangka di balik semua keterbatasannya itu, Murti ialah seorang penggebuk drum yang cukup andal dan kerap tampil di berbagai acara hingga di hadapan anggota dewan. Empat belas tahun silam, Murti kecil terpaksa hidup di jalanan bersama seorang pemulung. Ibunya telahtida sejak ia masih kecil, sedangkan ayahnya yang tidak sanggup merawat Murti menyerahkannya kepada pemulung. Beruntung ia ditemukan Yayasan Pendidikan Dwiruna Rawinala, sebuah lembaga yang melayani kebutuhan penyandang disabilitas ganda. Di lembaga itulah, Murti dirawat dan dididik hingga kini sehingga ia masih bisa mengembangkan bakarnya meskipun memiliki disabilitas ganda.

"Aku di sini belajar membuat telur asin, tanaman hias, es mambo, dan bermain musik," cerita Murti. Meski disabilitas mental. Murti bisa berkomunikasi dengan lancar. Ia pun mengungkapkan cita-citanya untuk menjadi guru musik. Selain Murti, lembaga yang berlokasi di Jl Inerbang No 38, Kramatjati, Jakarta Timur, itu juga mendidik 52 anak penyandang disabilitas ganda lainnya. Sigid Widodo, pembina Yayasan Rawinala, menyebutkan yayasannya adalah satu-satunya lembaga yang memberikan pendidikan bagi kaum dwiruna di Jakarta. "Hingga kini, lembaga kami yang berdiri sejak 1973 ini memiliki 14 guru dan 17 asisten," paparnya. Humas Yayasan Rawinala Belle YC Mantiri menjelaskan, terdapat empat hal yang menjadi pokok pembelajaran di yayasan ini, yaitu area pengembangan hidup (to live), bekerja (to work), bermain (to play), dan kemampuan menjalin relasi personal (fo love). Di sini juga terdapat empat jenis program pelayanan, yaitu pelayanan dini, pendidikan dasar, pendidikan lanjut, dan shelter worlishop untuk usia 18 tahun ke atas.. Selain sebagai tempat pengajaran dan pelatihan, Yayasan Rawinala memiliki panti asuhan yang diperuntukkan bagi mereka yang sebatang kara. "Selain itu, kami membuka diri bagi orang tua yang mau menitipkan anaknya di sini untuk dibina secara optimal," ungkap Belle. Untuk menghindari kemungkinan lepas tangan dari orangtua siswa, setiap hari libur yayasan mewajibkan anak-anak yang dititipkan di asrama untuk pulang kepada orang tua -mereka. Meskipun butuh perjuangan dalam mendidik anak-anak dwiruna, para pengajar tetap yakin jika seorang anak diberikan pendidikan yang baik, ia akan berkembang dengan baik pula. Melalui berbagai aktivitas, yayasan ini menunjukkan kepada masyarakat bahwa disabilitas ganda bisa hidup dan berkembang seperti manusia biasa. (Redaksi)

Difabel dan Hak untuk Memperoleh Pendidikan: Sebuah Renungan

Difabel (penyandang disabilitas, penyandang cacat) adalah pihak yang seringkali masih termarginalkan dalam masyarakat kita. Mereka masih sering terabaikan dalam hal ekonomi, kesehatan, politik, kesempatan kerja, sarana umum, dan juga pendidikan.

Menurut data *Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PPK) Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional*, dari 356,192 difabel di Indonesia, baru 110,789 yang memperoleh pendidikan. Sisanya belum tersentuh pendidikan. Padahal Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 secara jelas telah mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

Faktor yang menjadi penyebab masih banyaknya difabel yang belum mendapatkan pendidikan adalah selain faktor ekonomi, juga karena jumlah SLB (Sekolah Luar Biasa) di negeri ini masih sangat minim, serta jarak yang jauh dari kediaman difabel usia sekolah. Sementara belum semua sekolah umum bersedia menerima siswa difabel.

Dengan adanya kendala bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan, maka penerapan sistem pendidikan inklusi di setiap tingkat pendidikan adalah mutlak perlu. Hal ini bisa mengantisipasi masih kurangnya SLB dan jauhnya jarak dari rumah.

Sistem pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan dimana penyandang disabilitas memperoleh kesempatan yang sama dengan peserta didik lainnya di sekolah umum (regular). Tentu saja siswa difabel yang bisa masuk ke sekolah inklusi adalah siswa dengan kualifikasi tertentu atau intelektual tertentu yang tidak akan menghambat mereka untuk menerima pelajaran.

Dasar hukum dari penerapan sistem pendidikan inklusi ini adalah UUD 1945 pasal 31, UU no. 20/2003, UU no. 4/1997, dan juga Permendiknas no. 70/2009.

Meski payung hukum untuk sistem pendidikan inklusi ini sudah ada, namun dalam pelaksanaannya seolah **masih seperti 'macan ompong'**. Karena masih banyak sekolah umum yang tidak menerapkan sistem pendidikan inklusi ini. Ada memang, beberapa sekolah umum yang sudah menerapkan **system pendidikan inklusi ini**. Namun **'beberapa' saja** tidaklah cukup untuk mencerdaskan para penyandang disabilitas yang notabene adalah anak negeri ini juga.

Untuk itulah peran aktif Pemerintah Daerah sangat diperlukan untuk mewujudkan dan mengembangkan sistem pendidikan inklusi di daerah masing-masing. Peran aktif itu berupa penerbitan peraturan daerah yang jelas dan tegas tentang kewajiban sekolah-sekolah umum untuk menerapkan sistem pendidikan inklusi. Bahkan sanksi tegas perlu untuk diterapkan bila ada sekolah umum yang menolak untuk menerima siswa penyandang disabilitas. Dan juga sistem monitoring terhadap sistim ini juga mutlak diperlukan.

Berkait dengan system pendidikan inklusi ini, aksesibilitas dan kurikulum yang disesuaikan sangat diperlukan agar tidak menghambat siswa penyandang disabilitas. Hal yang tak kalah penting adalah penyediaan GPK (Guru Pembimbing Khusus) pada sekolah-sekolah inklusi. GPK yang dimaksud di sini adalah GPK yang selalu ada saat siswa penyandang disabilitas mengikuti jam pelajaran. Bukan GPK yang hanya datang dua kali seminggu. Karena bagaimana bisa siswa penyandang disabilitas mengikuti pelajaran dan bersaing dengan siswa lain jika GPK yang sangat dibutuhkan hanya datang dua kali seminggu? Sementara proses pendidikan berlangsung 7 kali seminggu. Setiap hari.

Demi berhasilnya sistem pendidikan inklusi ini, maka perlu adanya kerja sama yang terpadu antara Pemerintah, pihak sekolah dan juga masyarakat. Termasuk juga melibatkan lembaga (kalangan) disabilitas. **Bagaimana pun, 'ahli'** yang paling mengerti akan kebutuhan penyandang disabilitas adalah penyandang disabilitas juga.

Adalah bukan harapan yang terlalu muluk jika para difabel bisa mendapatkan kesempatan yang sama seperti warga negara yang lain. Menjadi difabel bukan berarti harus jauh dari dunia pendidikan. Tidak sama sekali! Karena memperoleh pendidikan adalah hak setiap orang. Setiap warga negara. Dan kaum difabel adalah warga Negara Indonesia juga. Bagaimana bisa negeri ini maju jika masih banyak anak bangsanya-nya yang terbelakang? (Redaksi)

